

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Pembangunan adalah proses perubahan positif yang terencana dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan tertentu. Hal itu tampak jelas dari tujuan Pembangunan Nasional Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, berdaya saing, dan berkeadilan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, sosial, dan budaya, serta bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan¹. Pembangunan perlu direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap tahapan membawa proyek lebih dekat ke tujuannya.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembangunan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah masih tingginya jumlah penduduk yang hidup dalam kemiskinan atau berada di bawah ambang batas kemiskinan yang telah ditetapkan². Seseorang dikatakan miskin, ketika ia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan³. Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya penghasilan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap berbagai kesempatan yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup. Dalam konteks ini, kemiskinan menjadi masalah multidimensi yang memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Berbagai faktor turut menyebabkan dan mempertahankan kondisi kemiskinan. Salah satunya adalah ketidakmampuan sejumlah sektor ekonomi untuk berkembang secara merata dan mengambil peran sebagai

¹ Admin Bappeda, "Pengertian Pembangunan Menurut Syamsiah Badruddin," Bappeda, July 8, 2015.

² Marta Ayu Saputri et al., "Strategi Pengentasan Kemiskinan: Tantangan Dan Peluang Dalam Mewujudkan SDGs Di Indonesia," *ENTITA: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, May 7, 2025, 523–38, <https://doi.org/10.19105/ejpis.v1i.19213>.

³ Fransiska Fu, "Kemiskinan Dan Ketimpangan: Tantangan Global Dalam Mewujudkan Kesejahteraan," BINUS University, April 15, 2025.

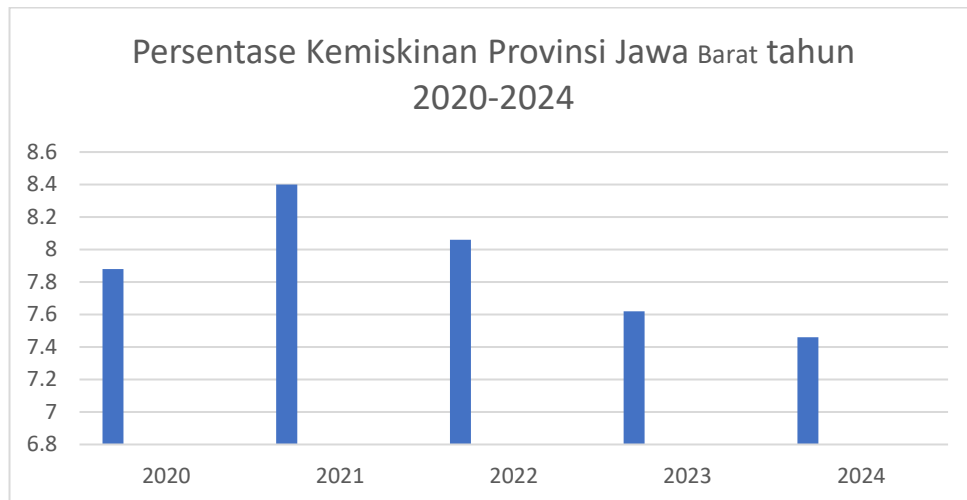
penggerak utama pembangunan¹. Akibatnya, distribusi pendapatan menjadi timpang, hanya dinikmati oleh sebagian kelompok, sementara kelompok lainnya tetap terpinggirkan. Aspirasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup, seringkali tidak sebanding dengan kesempatan yang tersedia. Hal ini semakin diperburuk oleh rendahnya kualitas hidup, terbatasnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta tingginya angka pengangguran. Semua kondisi ini saling terkait dan memperkuat satu sama lain, menjadikan kemiskinan bukan sekadar masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan struktural yang menuntut perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS RI), persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat pada September 2024 tercatat sebesar 7,08 persen, atau menurun 0,38 persen dibandingkan dengan Maret 2022, yang saat itu mencapai 7,46 persen². Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat, khususnya dalam hal akses terhadap pendapatan, pekerjaan, serta layanan dasar. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat masih tergolong tinggi secara absolut, mengingat provinsi ini merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Hingga tahun 2024, Kabupaten Indramayu tercatat sebagai kabupaten termiskin di Jawa Barat, dengan persentase penduduk miskin sebesar 11,93%³. Sementara Jawa Barat sendiri menduduki peringkat kedua sebagai provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Ini merupakan permasalahan yang serius dan kompleks. Berikut ini data persentase kemiskinan di Jawa Barat sepanjang lima tahun terakhir:

¹ Wafi Farhan, Ilham Wahyu, and Yuliatr Meganingrum, "Penerapan Teori Big Push Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Mengatasi Kemiskinan Jember Poverty," *MATRAPOLIS: Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, January 14, 2020, 14–30, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/MATRAPOLIS/index>.

² Badan Pusat Statistik, "Berita Resmi Statistik: Profil Kemiskinan Di Jawa Barat September 2024," BPS, 2024.

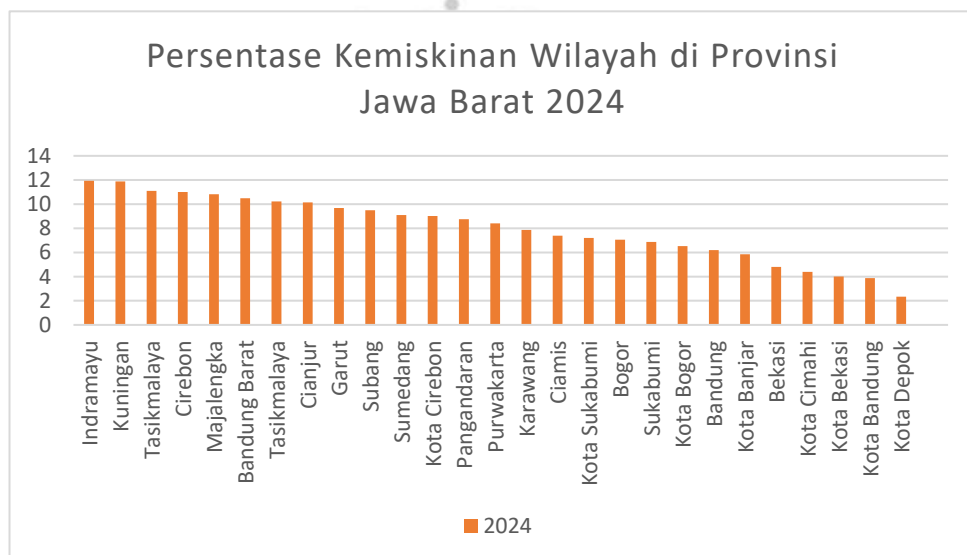
³ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, "Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Jawa Barat (Persen), 2024," BPS, October 21, 2024.



Gambar 1. 1 Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2024, Data Diolah kembali

Dari gambar 1.1 di atas dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sebesar 7,88 persen, kemudian di tahun 2021 naik sebesar 8,4 persen, pada tahun 2022 menurun sebesar 8,06 persen, pada tahun 2023 hingga tahun 2024 terus mengalami penurunan hingga 7,46 persen.



Gambar 1. 2 Grafik Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2024, Data diolah kembali

Gambar 1.2 di atas menunjukkan rata-rata persentase kemiskinan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Dapat dilihat pada grafik tersebut, bahwa persentase kemiskinan Kabupaten Indramayu memiliki persentase kemiskinan tertinggi sebesar 11,93 persen, diikuti Kabupaten Kuningan sebesar 11,88 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 11,10 persen. Selanjutnya, Kabupaten Cirebon sebesar 11,00 persen, Kabupaten Majalengka sebesar 10,82 persen, Kabupaten Bandung Barat sebesar 10,49 persen, Kabupaten Tasikmalaya sebesar 10,23 persen, dan Kabupaten Cianjur sebesar 10,14 persen. Dengan demikian, terdapat delapan kabupaten/kota yang memiliki persentase kemiskinan di atas 10 persen.

Pada kelompok menengah, Kabupaten Garut memiliki persentase kemiskinan sebesar 9,68 persen, Kabupaten Subang 9,49 persen, Kabupaten Sumedang 9,10 persen, Kota Cirebon 9,02 persen, Kabupaten Pangandaran 8,75 persen, Kabupaten Purwakarta 8,41 persen, Kabupaten Karawang 7,86 persen, Kabupaten Ciamis 7,39 persen, Kota Sukabumi 7,20 persen, Kabupaten Bogor 7,05 persen, dan Kabupaten Sukabumi 6,87 persen. Sementara itu, persentase kemiskinan yang relatif lebih rendah terdapat di Kota Bogor sebesar 6,53 persen, Kabupaten Bandung 6,19 persen, Kota Banjar 5,85 persen, Kabupaten Bekasi 4,80 persen, Kota Cimahi 4,39 persen, Kota Bekasi 4,01 persen, Kota Bandung 3,87 persen, dan Kota Depok 2,34 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di Jawa Barat memiliki karakteristik kewilayahan yang kuat. Kabupaten Indramayu yang memiliki persentase kemiskinan 11,93 persen berada pada kondisi yang sangat berbeda dengan Kota Depok yang hanya sebesar 2,34 persen. Bahkan, selisih keduanya mencapai 9,59 persen poin. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan pada tingkat provinsi belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kesejahteraan pada tingkat kabupaten/kota. Data BPS juga menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Barat memiliki dimensi perkotaan dan perdesaan; pada September

2024, tingkat kemiskinan perdesaan sebesar 8,85 persen masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 6,65 persen.

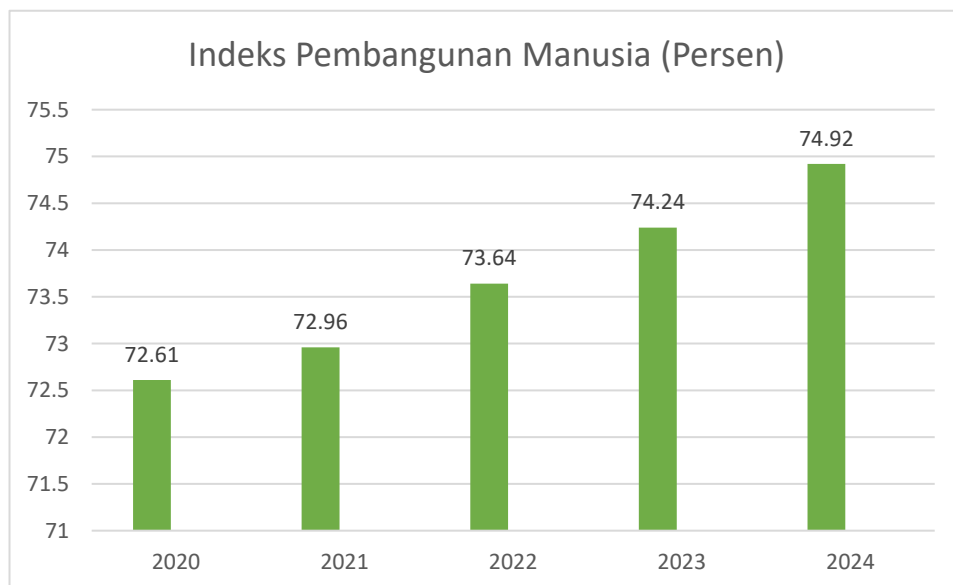
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis, yang digunakan secara luas untuk menilai keberhasilan suatu wilayah, dalam membangun kualitas hidup penduduknya. IPM mengukur tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu perkiraan atau harapan hidup dan kesehatan (*life expectancy*), pengetahuan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak yang diukur dari pendapatan per kapita⁴. Dengan cakupan tersebut, IPM mencerminkan hasil akhir dari berbagai program pembangunan, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi, serta menjadi acuan penting dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, wilayah dengan nilai IPM yang tinggi idealnya diharapkan mempunyai kualitas hidup masyarakat yang tinggi. Alternatifnya, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi nilai IPM, maka semakin rendah garis kemiskinan⁵.

Sesungguhnya, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat terus mengalami kemajuan. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

⁴ M Faqihudin, "Human Development Index (HDI) Salah Satu Indikator Yang Populer Untuk Mengukur Kinerja Pembangunan Manusia" (Tegal, n.d.), http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Pembangunan_Manusia.

⁵ Tia Ratu Gandasari, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu (Jurnal Ilmu Ekonomi)* 6, no. 2 (October 2016): 236–55, <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/>.



Gambar 1. 3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 (Persen)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2024, Data diolah kembali

Berdasarkan data di atas, kita dapat melihat bahwa grafik Indeks Pembangunan Manusia cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 74,92 persen. Hasil penelitian yang dilakukan Anwar dkk tahun 2024 memperlihatkan, bahwa IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan⁶. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dani, dkk tahun 2024 menyimpulkan, bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan positif signifikan dengan kemiskinan⁷.

Salah satu indikator penting yang turut memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat adalah tingkat pengangguran. Ketika sebagian besar angkatan kerja tidak terserap oleh pasar kerja, maka kemampuan masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang layak menjadi terhambat.

⁶ Anwar, Sayuti, and Afni Abdul Manan, "Pengaruh IPM Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di Aceh Barat," *Jurnal Serambi Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 8 (December 21, 2024): 297–305.

⁷ Dani Zanzibar et al., "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur," *JURNAL ECONOMINA* 3, no. 4 (April 29, 2024): 562–74, <https://doi.org/10.55681/economina.v3i4.1296>.

Pengangguran tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan rumah tangga, tetapi juga memperlemah daya beli, memperbesar ketergantungan pada bantuan sosial, serta berpotensi meningkatkan beban fiskal negara. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung memperparah tingkat kemiskinan, terutama di wilayah dengan kesempatan kerja yang terbatas dan ketimpangan sektor informal yang tinggi⁸. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan menjadi salah satu strategi utama dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Barat. Secara teoritis, ketika tingkat pengangguran mengalami kenaikan secara otomatis, tingkat kemiskinan akan meningkat pula. Hal ini menunjukkan terjadi hubungan yang positif antara kemiskinan dan pengangguran⁹.

Indikator lain yang secara teoritis berpotensi memengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Barat adalah pertumbuhan ekonomi. Secara teori, pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan *output* nasional dan pendapatan per kapita, yang idealnya akan berdampak positif terhadap penurunan kemiskinan¹⁰. Ketika perekonomian tumbuh, peluang kerja cenderung meningkat, pendapatan masyarakat naik, dan daya beli pun membaik. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tidak selalu linier. Apabila pertumbuhan tersebut tidak inklusif misalnya hanya dinikmati oleh kelompok atas atau terpusat pada sektor tertentu maka kesenjangan pendapatan bisa melebar dan sebagian masyarakat tetap terjebak dalam kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bersifat merata, berkelanjutan, dan mampu menyentuh kelompok rentan agar benar-benar efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

⁸ Badan Pusat Statistik, "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023," BPS, 2023.

⁹ Arianto Sandi Pakan, Michael, and Priyagus, "Pengaruh Investasi Swasta Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Terbuka Di Kabupaten Kutai Barat," *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 4, no. 3 (2019): 2019, <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIEM>.

¹⁰ Ari Muliarta Ginting and Rasbin, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Krisis," *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, no. 1 (December 2010).

Beragam faktor ekonomi menjadi penentu fluktuasi angka kemiskinan antar daerah, seperti tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, pendekatan konvensional dalam menganalisis kemiskinan sering kali mengabaikan aspek nilai, spiritualitas, dan keadilan sosial yang menjadi inti dari ekonomi Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kemiskinan tidak dipahami semata-mata sebagai kekurangan pendapatan, tetapi sebagai kondisi kegagalan sistem ekonomi dan sosial dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara adil dan bermartabat¹¹. Al-Ghazali menegaskan bahwa kemiskinan merupakan ancaman serius terhadap tercapainya tujuan syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan dalam Islam bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan kewajiban moral, sosial, dan institusional negara¹².

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ibn Khaldun, yang menyatakan bahwa kemiskinan muncul akibat melemahnya aktivitas ekonomi produktif, ketimpangan distribusi pendapatan, serta kegagalan negara dalam menciptakan keadilan ekonomi. Dalam teori *circle of equity*, Ibn Khaldun menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat hanya dapat dicapai apabila pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kesempatan kerja yang luas¹³. Ketika distribusi hasil pembangunan tidak merata, pertumbuhan justru berpotensi memperparah kemiskinan.

Perspektif normatif Islam mengenai keadilan distribusi dan kewajiban sosial dalam mengentaskan kemiskinan ditegaskan secara

¹¹ Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).

¹² Stid Muhammad Natsir, Indonesia Mujiadi, and Stiu Darul Hikmah, "Paradigma Kemiskinan Dalam Perspektif Islam" 7, no. 2 (2024): 4–12.

¹³ Hanief Sirajul Huda, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Ibnu Khaldun Dalam Kitab Muqaddimah Dan Relevansinya Di Indonesia," *Al-Istitsmar* 1, no. 1 (2024): 70–83.

eksplisit dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

“... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (QS. Al-Hasyr: 7)¹⁴

Ayat ini menunjukkan prinsip dasar distribusi kekayaan dalam Islam, yaitu mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu dan memastikan pemerataan ekonomi. Hal ini relevan dengan fenomena ketimpangan yang menjadi salah satu penyebab struktural kemiskinan.

Selain itu, dalam Surah Adz-Dzariyat ayat 19 ditegaskan:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”

Ayat ini menegaskan bahwa dalam setiap harta terdapat hak sosial bagi kaum miskin, yang menjadi dasar konseptual bagi instrumen distribusi seperti zakat, infak, dan sedekah dalam sistem ekonomi Islam¹⁵.

Lebih lanjut, dalam Surah Al-Ma'un ayat 1–3 Allah SWT mengecam sikap abai terhadap kaum miskin:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ١ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ٢ وَلَا يَحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ٣

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.”

¹⁴ Rizqa Ananda, Akh. Fauzi Aseri, and Anwar Hafidzi, “Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Syariah : Studi QS . Al-Hasyr Ayat 7 Terhadap Kebijakan Fiskal Dan Pemerataan Ekonomi Di Indonesia,” *Journal of Islamic and Law Studies* 9, no. 1 (2025): 95.

¹⁵ Chusnul Chotimah et al., “Analisis Qs. Az-Zariyat Ayat 19 Dalam Pengimplementasian Hak Dan Kewajiban Warga Negara,” *Jurnal Diskursus Islam* 12, no. 2 (2024): 135.

Ayat ini memperlihatkan bahwa pengabaian terhadap kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan kegagalan moral dan spiritual individu maupun masyarakat.

Dengan demikian, kemiskinan menurut sarjana ekonomi Islam merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh kualitas pembangunan manusia, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, serta keadilan distribusi. Pendekatan ekonomi Islam menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dari beberapa masalah yang telah diuraikan dalam latar belakang dan berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berbeda-beda maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Persentase Kemiskinan Di Jawa Barat Tahun 2020-2024 dalam Perspektif Ekonomi Islam”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan di latar belakang, penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti, yakni:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024?
2. Apakah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh terhadap Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024?
4. Apakah variabel Independen (Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi) berpengaruh secara

simultan terhadap variabel Dependen (Persentase Kemiskinan) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024?

5. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Persentase Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020–2024 ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusah masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024.
2. Untuk menguji pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Persentase Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024.
3. Untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Persentase Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tahun 2020–2024.
4. Untuk menguji pengaruh variabel Independen (Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi) secara simultan terhadap variabel Dependen (Persentase Kemiskinan) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
5. Untuk menganalisis Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Persentase Kemiskinan di Jawa Barat tahun 2020–2024 ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang memengaruhi persentase kemiskinan di tingkat daerah.

- b. Memperkaya kajian empiris mengenai pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap persentase kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
- c. Menambah referensi akademik dalam pengembangan penelitian ekonomi Islam yang mengkaji kemiskinan melalui pendekatan maqāsid al-syarī‘ah, terutama dalam aspek pemeliharaan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan harta (ḥifẓ al-māl).
- d. Mengembangkan pemahaman konseptual mengenai hubungan antara pembangunan manusia, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam.
- e. Menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan model pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan, keadilan sosial, dan pemerataan ekonomi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi persentase kemiskinan. Dan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dan sumber literatur bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan mengenai kemiskinan, pembangunan manusia, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan, dan produktivitas kerja sebagai faktor yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat

mengenai kondisi kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian telah melakukan penelitian yang meneliti hubungan indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah, tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan. Inspirasi penelitian ini dan sumber penelitian sejenis dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nelmy Fitria, Dea, Masna dan Misfi	Pengaruh Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022	Menunjukkan, bahwa baik secara parsial maupun simultan, tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung ¹⁶ .	Sama-sama meneliti pengaruh TPT terhadap kemiskinan dengan data panel daerah.	Penelitian terdahulu menggunakan variabel TPT dan pertumbuhan penduduk di Provinsi Lampung periode 2020–2022. Penelitian ini menambahkan IPM dan pertumbuhan ekonomi, menggunakan objek Jawa Barat tahun

¹⁶ Nelmy Fitria Utami et al., “Pengaruh Pengangguran Terbuka Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung Tahun 2020-2022,” *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif* 3, no. 1 (January 2, 2025): 12–23, <https://doi.org/10.59024/jumek.v3i1.507>.

					2020–2024, serta dianalisis dalam perspektif Ekonomi Islam.
2.	Noni Rozaini, Savira Maharani, Dila Azhari dan Maisyaroh	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan tingkat Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan. ¹⁷	Sama-sama menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan TPT terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu dilakukan di Provinsi Sumatera Utara dan tidak memasukkan IPM maupun perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini menambahkan IPM dan perspektif Ekonomi Islam.
3.	Yoseb Boari, Heppi Syofya, Ika Agustina, Mohamd Fathur Rohman dan Rosalia Irawaty	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2019-2023, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di	Sama-sama mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu menggunakan variabel pendidikan dan pertumbuhan penduduk, sedangkan penelitian ini menggunakan IPM dan TPT serta fokus pada Jawa Barat..

¹⁷ Noni Rozaini et al., “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara,” *Jesya* 7, no. 1 (January 1, 2024): 396–405, <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1405>.

			Indonesia tahun 2019-2023 ¹⁸ .		
4.	Salbila Alfira Balqis, Puja Melati, Asinidar, Nurlaila Hanum, Puti Andiny, Safuridar	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Pidie	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan kabupaten pidie, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pidie. ¹⁹	Sama-sama menggunakan variabel IPM dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu tidak memasukkan TPT dan hanya dilakukan di Kabupaten Pidie. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen sekaligus serta perspektif Ekonomi Islam.
5.	Dani Zanzibar, Fika Rahmadhanika, Ratri Kiswanda dan Misfi Laili Rohmi	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur	Indeks Pembangunan Manusia memiliki hubungan positif signifikan dengan kemiskinan, sedangkan tingkat pengangguran memiliki hubungan negatif dengan kemiskinan ²⁰ .	Sama-sama menggunakan variabel IPM dan pengangguran terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu dilakukan di Jawa Timur dan tidak memasukkan pertumbuhan ekonomi maupun perspektif Ekonomi Islam.
6.	Tessa Michelle, Agnes dan Steeva	Pengaruh Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi	.Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penelitian Pengangguran Terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Untuk Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan	Sama-sama menggunakan IPM dan TPT sebagai variabel	Penelitian terdahulu menambahkan pengeluaran pemerintah, sedangkan penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel ketiga

¹⁸ Yoseb Boari et al., "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia," *Edunomika* 08, no. 02 (2024): 1–13.

¹⁹ Salbila Alfira Balqis et al., "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pidie," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia* 2, no. 4 (November 15, 2024): 137–47, <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i4.965>.

²⁰ Zanzibar et al., "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur."

			signifikan terhadap Kemiskinan. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan. ²¹		dan fokus di Jawa Barat.
7.	Rama Bhaskara Praja, Masruri Muchtar dan Pardomuan Robinson Sihombin	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta	Secara parsial, TPT dan laju pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Di sisi lain, IPM dan persentase penduduk miskin pada periode t-1 memiliki pengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin ²² .	Sama-sama menggunakan IPM dan TPT terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu menggunakan laju pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta, sedangkan penelitian ini menggunakan pertumbuhan ekonomi dan perspektif Ekonomi Islam.
8.	Q'rene V.F Supit, Joseph B. Kalangi dan Steeva	Pengaruh Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan	Sama-sama menggunakan IPM, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Minahasa tanpa perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini dilakukan di Jawa Barat tahun 2020–2024 dan dianalisis berdasarkan

²¹ Tessa Michelle Derek, Agnes Lapian, and Steeva Y.L Tumangkeng, “Pengaruh Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 23, no. 9 (October 2023): 49–60.

²² Rama Bhaskara Praja, Masruri Muchtar, and Robinson Sihombing, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Kemiskinan Di DKI Jakarta,” *Ecoplan* 6, no. 1 (2023): 78–86.

			terhadap kemiskinan. ²³		ekonomi Islam.
9.	Beatrice Karolinska ¹ , Irawati Panjaitan dan Renny Simamora	Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara ²⁴ .	Sama-sama menggunakan IPM dan TPT terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu tidak memasukkan pertumbuhan ekonomi serta dilakukan di Sumatera Utara. Penelitian ini menambahkan variabel pertumbuhan ekonomi dan perspektif Ekonomi Islam.
10.	Rosdina Sagala, Harlen dan Bunga Chintia Utami	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pelalawan	Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pelalawan Dan secara parsial Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Pelalawan ²⁵ .	Sama-sama menggunakan pertumbuhan ekonomi dan TPT terhadap kemiskinan	Penelitian terdahulu tidak menggunakan IPM dan hanya dilakukan di Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menambahkan IPM dan menggunakan perspektif Ekonomi Islam.
11.	Rizky Febrian Saragih, Purnama Ramadani	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat	Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh tidak	Sama-sama menggunakan IPM dan TPT	Penelitian terdahulu tidak memasukkan pertumbuhan

²³ Q'rene V.F Supit, Josep B. Kalangi, and Sreeva Y.L Tumangkeng, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa," *Jurnal Berkala Efisiensi Ilmiah* 23, no. 10 (November 2023): 73–84.

²⁴ Beatrice Karolinska, Irawati Panjaitan, and Renny Simamora, "Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Promosi: Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro* 11, no. 2 (2023): 213–25.

²⁵ Rosdina Sagala, Harlen, and Bunga Chintia Utami, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Pelalawan," *Jurnal Niara* 15, no. 3 (January 2023): 514–24.

	Silalahi dan Khairina Tambunan	Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021	signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat pengangguran Terbuka secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia ²⁶ .	terhadap kemiskinan.	ekonomi dan tidak menggunakan perspektif Ekonomi Islam
12.	Juvico Akbar Karuniawan dan Aris Soelistyo	Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016-2020	Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, ²⁷ .	Sama-sama mengkaji pengangguran terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu menggunakan pengeluaran pemerintah dan inflasi, sedangkan penelitian ini menggunakan IPM dan pertumbuhan ekonomi.
13.	Siti Hanifah dan Nurul Hanifa	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pengangguran mempengaruhi	Sama-sama menggunakan pertumbuhan ekonomi dan	Penelitian terdahulu menambahkan upah

²⁶ Rizky Febrian Saragih, Purnama Ramadhani Silalahi, and Khairina Tambunan, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2007 – 2021," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (February 7, 2022): 71–79, <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i2.36>.

²⁷ Juvico Akbar Karuniawan and Aris Soelistyo, "Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 3 (November 25, 2022): 109–20, <https://doi.org/10.54783/jin.v4i3.621>.

		Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan	bersama-sama positif signifikan terhadap kemiskinan. Secara parsial variable pertumbuhan ekonomi, variabel pengangguran mempengaruhi negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan ²⁸ .	pengangguran terhadap kemiskinan.	minimum dan dilakukan di Kabupaten Lamongan, sedangkan penelitian ini menggunakan IPM dan perspektif Ekonomi Islam.
14.	Erliza Millenia Putri dan Dewi Zaini Putri	Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia	tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia ²⁹ .	Sama-sama menggunakan TPT terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu menggunakan upah minimum, pendidikan, dan pengeluaran pemerintah, sedangkan penelitian ini menggunakan IPM dan pertumbuhan ekonomi.
15.	Miftaqh Nur Faritz dan Ady Soejoto	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Tengah ³⁰ .	Sama-sama menggunakan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan.	Penelitian terdahulu menggunakan rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah. Penelitian

²⁸ Siti Hanifah and Nurul Hanifa, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Lamongan," *Independent: Journal of Economics* 1, no. 3 (2021): 191–206.

²⁹ Erliza Millenia Putri and Dewi Zaini Putri, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan* 10, no. 2 (November 2021): 107–14, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/ekosains>.

³⁰ Miftaqh Nur Faritz and Ady Soejoto, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *JUPE* 8, no. 1 (2020): 16–21.

		Provinsi Jawa Tengah			Anda menggunakan IPM, TPT, dan perspektif Ekonomi Islam.
--	--	----------------------	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya diukur dari kemampuan menciptakan pertumbuhan output, tetapi juga dari keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Dalam konteks Jawa Barat selama periode 2020–2024, dinamika pembangunan dipengaruhi oleh perubahan struktural ekonomi, dampak pandemi, serta proses pemulihan yang tidak merata antarwilayah. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat dipandang sebagai hasil interaksi antara kualitas pembangunan manusia, kondisi pasar tenaga kerja, dan kinerja pertumbuhan ekonomi daerah.

1. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Persentase Kemiskinan

Faktor pertama yang dipertimbangkan adalah kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengacu pada teori *human capital*, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pendapatan tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga memperkuat kapasitas daerah dalam mendorong produktivitas. Daerah dengan IPM tinggi biasanya memiliki kualitas tenaga kerja yang lebih baik, sehingga peluang kerja lebih luas dan risiko kemiskinan lebih rendah³¹. Sebaliknya, IPM rendah memperbesar kemungkinan masyarakat tidak mampu mengakses pekerjaan layak, sehingga lebih rentan terhadap kemiskinan.

³¹ Dian Nugraha Fathony and Maulidyah Indira Hasmarini, “Faktor-Faktor Ekonomi Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di: Studi Indeks Gini, UMK, IPM, Dan Pengangguran(2019-2023),” *YUME : Journal of Management* 7, no. 2 (2024): 807–16.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Q'rene V. F. Supit, dkk menunjukkan bahwa peningkatan IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan³². Dalam konteks Jawa Barat periode 2020–2024, ketimpangan IPM antarwilayah menjadi faktor penting yang menjelaskan variasi kemiskinan regional, terutama antara kawasan metropolitan dan daerah perdesaan.

Dalam perspektif Ekonomi Islam, peningkatan kualitas manusia memiliki hubungan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *hifẓ al-naḥs* melalui pemenuhan kesehatan, *hifẓ al-'aql* melalui pendidikan, dan *hifẓ al-māl* melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam memperoleh dan mengelola sumber daya ekonomi. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya berorientasi pada peningkatan indikator ekonomi, tetapi juga pada tercapainya kemaslahatan.

2. Pengaruh Pengangguran Terbuka Terhadap Persentase Kemiskinan

Faktor kedua adalah tingkat pengangguran terbuka, yang dalam konteks penelitian ini dijelaskan menggunakan teori Keynesian. Menurut Keynes, pengangguran terutama terjadi akibat kurangnya permintaan agregat dalam perekonomian³³. Ketika konsumsi masyarakat menurun, investasi stagnan, dan belanja pemerintah kurang efektif, total permintaan agregat akan turun, sehingga kegiatan produksi melemah. Akibatnya, dunia usaha mengurangi tenaga kerja dan tingkat pengangguran meningkat.

Penelitian terdahulu di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan bahwa TPT memiliki hubungan positif dengan tingkat kemiskinan³⁴. Dalam konteks wilayah Jawa Barat, daerah yang mengalami pelemahan permintaan agregat baik karena rendahnya konsumsi masyarakat,

³² V.F Supit, B. Kalangi, and Tumangkeng, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Minahasa."

³³ Muhdar HM, "Potret Ketenagakerjaan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Di: Masalah Dan Solusi," *Jurnal Al-Buhuts* 11, no. 1 (June 2015): 42–66.

³⁴ Michelle Derek, Lopian, and Tumangkeng, "Pengaruh Pengangguran Terbuka, Pengeluaran Pemerintah, Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara."

terbatasnya investasi lokal, maupun rendahnya aktivitas ekonomi sektor utama akan menghadapi tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Pengangguran ini kemudian berdampak langsung pada peningkatan kemiskinan karena pendapatan masyarakat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Persentase Kemiskinan

Faktor ketiga adalah pertumbuhan ekonomi daerah sebagai representasi dinamika aktivitas produksi dan investasi lokal. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat membuka peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka kemiskinan³⁵. Namun pertumbuhan yang tidak merata justru berpotensi meningkatkan ketimpangan.

Kondisi tersebut relevan dengan perspektif Ekonomi Islam yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi harus menghasilkan keadilan dan pemerataan, bukan hanya peningkatan output ekonomi. Pertumbuhan ekonomi idealnya memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang rentan dan berpendapatan rendah.

Hasil penelitian terdahulu di tingkat regional Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan³⁶. Beberapa daerah perkotaan di Jawa Barat menunjukkan pertumbuhan ekonomi pesat karena basis industri dan jasa yang kuat, sementara wilayah lainnya tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur atau rendahnya diversifikasi ekonomi. Hal ini menegaskan pentingnya mengukur sejauh mana pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan pada tingkat daerah.

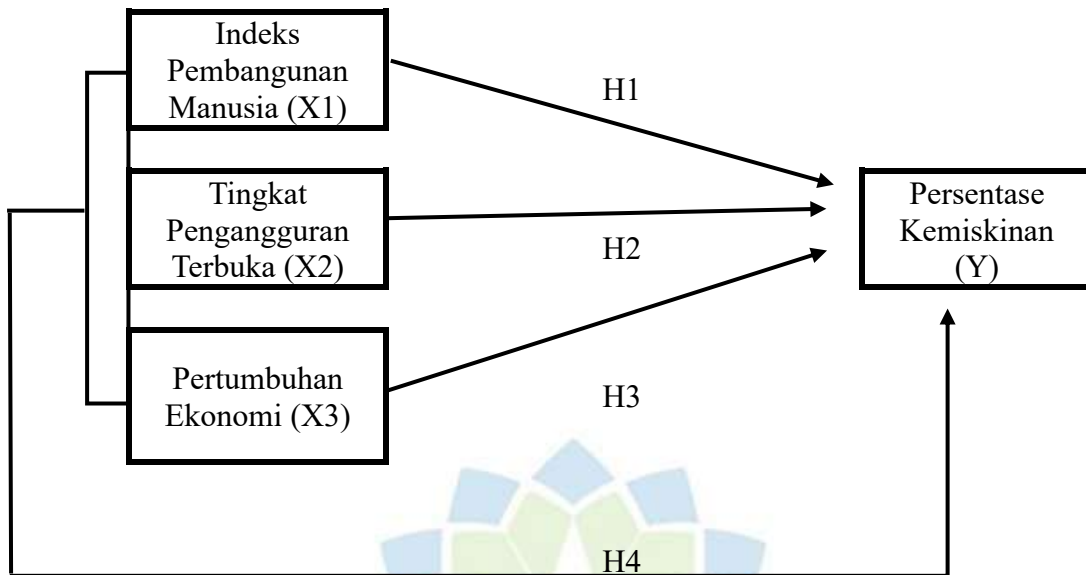
³⁵ Giofano Johaness Sipota, Een N Walewangko, and Irawaty Masloman, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Dalam Menurunkan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 24, no. 3 (2024): 25–36.

³⁶ Rozaini et al., "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara."

4. Pengaruh IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Persentase Kemiskinan

Secara simultan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan pertumbuhan ekonomi diduga memiliki pengaruh terhadap persentase kemiskinan. Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dalam menentukan kondisi kesejahteraan masyarakat. Peningkatan IPM melalui perbaikan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendapatan, sehingga berpotensi menurunkan persentase kemiskinan. Sebaliknya, meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka dapat mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup, sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan aktivitas perekonomian diharapkan dapat menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, meskipun dampaknya terhadap kemiskinan bergantung pada sejauh mana hasil pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara merata. Dengan demikian, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama diduga berpengaruh terhadap persentase kemiskinan di Provinsi Jawa Barat. Hubungan simultan ketiga variabel tersebut selanjutnya diuji secara empiris untuk mengetahui apakah secara bersama-sama IPM, TPT, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persentase kemiskinan selama periode 2020–2024.

Berikut gambar model penelitian ini:



Gambar 1. 4 Model Penelitian

G. Hipotesis

Hipotesis yang penulis ajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H1 : Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
2. H2 : Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
3. H3 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.
4. H4 : Indeks Pembangunan Manusia IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Persentase Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024